

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

6.1.1 Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan yang dilaksanakan pada kerjasama antar daerah adalah melalui program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dengan kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerja sama antara daerah dalam penyediaan pelayanan publik, Pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), pertemuan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Keikutsertaan Pemerintah Kota Jambi dalam ICLEI (*International Council for Local Environmental Initiatives*), UCLG (*United Cities and Local Government*) dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik

Adapun kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Daerah pada tahun 2015 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 8.104.575.000,00 dimana realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 95.35% atau Rp.7.723.365.000,00 Yang didalamnya terdapat dua sub kegiatan yaitu, Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kota Jambi, dan penyelenggaraan kegiatan APEKSI.

TKKSD yang merupakan tim koordinasi penyelenggaraan kerjasama daerah, dimana setiap kerjasama harus melalui kajian tim TKKSD untuk mendapatkan kerjasama yang saling menguntungkan, namun pada tahun 2016, Tim TKKSD belum berfungsi secara optimal.

6.1.2 Kegiatan Pertemuan APEKSI

SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan ini adalah Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi, pada kegiatan Fasilitasi dan peningkatan kerjasama antar daerah dengan Pagu Anggaran **Rp 8.104.575.000,-**. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan MUNAS V APEKSI di Kota Jambi sebesar Rp. 7.800.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 7.470.000.000.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah se-Indonesia.

Tahun 2016, kegiatan Komwill II Apeksi yang diikuti oleh Kota Jambi sebanyak satu kali, yaitu: Catur wulan II APEKSI Sumbagsel tahun 2016 di Kota Metro.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Regional se-Sumbagsel dan caturwulan II APEKSI Sumbagsel tahun 2016.

Program peningkatan kerjasama APEKSI ini masih terbatas pada pertemuan-pertemuan Rakernas Anggota APEKSI se-Indonesia dan pertemuan Caturwulan Anggota APEKSI Komwil II se-Sumbagsel, dimana pada pertemuan tersebut dibahas tentang Peraturan-peraturan Pemerintah yang dipandang masih kurang mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pada pertemuan MUNAS V APEKSI di Kota Jambi tanggal 26 s.d 29 Juli 2016, tema yang diangkat adalah STRATEGI PELAKSANAAN OTONOMI PASCA UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Dari pertemuannya itu dibuatkan rekomendasi dan usulan yang konstruktif.

Selanjutnya pada tahun 2016, Kota Jambi mengikuti Pertemuan Rakor APEKSI Komwil II Sumbagsel Caturwulan II Tahun 2016 di Kota Metro tanggal 24 s.d 25 Mei 2016 dengan mengangkat tema *Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Vertikalisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Penyerahan Personil, Prasarana/Sarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

6.1.3. Kegiatan Pertemuan AKKOPSI

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Jambi juga masih menjadi anggota Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), yang merupakan aliansi kabupaten/kota untuk mendorong terwujudnya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia, dalam rangka memenuhi target universal access sanitasi pada akhir tahun 2019.

Kegiatan AKKOPSI yang diikuti oleh pemerintah Kota Jambi pada tahun 2016 diantaranya adalah CITY SANITATION SUMMIT (CSS) – XVI berlokasi di Banda Aceh, pada tanggal 24 November 2016. Adapun kesimpulan pada kegiatan ini adalah Untuk mewujudkan kondisi sanitasi yang ideal, sekaligus untuk memenuhi target *universal access* sanitasi pada akhir tahun 2019 di masing-masing kabupaten/kota, maka setiap Kepala Daerah anggota AKKOPSI berkomitmen untuk :

1. Melakukan secara langsung koordinasi dan monitoring rutin berkala terhadap progres pembangunan sanitasi di kabupaten/kota masing-masing secara terpadu, terukur dan sesuai Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
2. Membentuk dan menerapkan kebijakan daerah tentang GERAKAN SANITASI TERPADU untuk memastikan terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan sanitasi terutama dalam upaya mewujudkan sinergi lintas SKPD dan non-SKPD termasuk TNI, pihak swasta,

para tokoh dan organisasi keagamaan, serta pihak swasta untuk kesuksesan pembangunan sanitasi di daerah.

3. Setidak-tidaknya mewujudkan stop perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, sekaligus meningkatkan kualitas dan peran regulator serta operator layanan air limbah.
4. Meningkatkan kinerja dan sinergitas regulator dan operator dalam upaya keterpaduan program pengurangan sampah dari sumbernya, mendorong pembentukan dan menjaga keberlangsungan siklus bisnis persampahan di daerah.
5. Mengarusutamakan pembangunan sanitasi dalam pembangunan desa maupun dalam pengalokasian dana desa, dan memfasilitasi pelaksanaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dalam pemanfaatan dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf produktif untuk penyediaan akses sanitasi bagi masyarakat yang kurang mampu.
6. Mendorong secara aktif pembentukan kebijakan nasional yang terkait dengan SOTK Daerah, yang dapat mendukung terjadinya percepatan penyediaan layanan sanitasi, maupun kebijakan nasional yang terkait dengan alokasi APBN serta hibah dari mitra pembangunan bagipercepatan penyediaan layanan sanitasi di daerah.

6.2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerja sama Pemerintah Daerah Kota Jambi dengan Pihak Ketiga dilaksanakan melalui Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi dalam bentuk penerbitan perizinan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.

Berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 3 Oktober 2014, Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada BPMPPT yang berwenang untuk mengeluarkan 41 jenis izin dan penambahan 1 izin lagi menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sehingga total jenis pelayanan perizinan yang ada di Kota Jambi berjumlah 42 buah. Pada tahun 2016, Izin prinsip yang dikeluarkan berjumlah 11 (sebelas) buah dengan nilai investasi sebesar Rp. 320.035.500.000,- sebagaimana tergambar pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Daftar Izin Prinsip Yang Terbit Tahun 2016

No.	Nama Perusahaan	Nama Usaha	Tanggal izin	Rencana Investasi (Rp.)
1.	CV. Teksindo Lestari	Real Estate	15 Feb 2016	7.400.000.000
2.	PT. Raja Satria Mandiri	MM Raja	14 Maret 2016	4.500.000.000
3.	PT. Aroma Cempaka	Cempaka	17 Maret 2016	5.106.000.000
4.	PT. Inti Cakrawala Citra	Indogrosir	30 Maret 2016	225.000.000.000
5.	PT. Sinar Berlian Nusantara	Supermarket (Fress Moon)	25 April 2016	4.057.500.000
6.	PT. Halina Mutiara	Developer/Real Estate (Perumahan)	30 April 2016	8.472.000.000
7.	PT. Golden Harvest Hotel	V-Hotel	26 Juni 2016	12.000.000.000
8.	PT. Ratu Permata Hotelindo	Hotel ODUWA WESTON	26 Juni 2016	33.375.000.000
9.	PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK.	Minimarket (Alfamart)	30 Juni 2016	17.000.000.000
10.	CV. Tropi Mart	Supermarket (Sijenjang)	24 Oktober 2016	1.800.000.000
11.	CV. Tropi Mart	Supermarket (Tl. Bakung)	3 November 2016	1.325.000.000
Jumlah				320.035.500.000

Pada Tahun 2016, terdapat sebanyak 13 (tiga belas) buah *Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman* yang ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Jambi dengan pihak ketiga, sementara pada tahun 2015, terdapat 7 MoU yang ditandatangani. Table 6.2 dibawah menunjukkan kesepakatan yang dilakukan sepanjang tahun 2015 dengan pihak ketiga.

Tabel 6.2.
Memorandum of Understanding yang ditanda tangani oleh
Pemerintah Kota Jambi dengan pihak ketiga Tahun 2016

No.	TANGGAL NOMOR MoU	NAMA MoU	MASA MoU	NAMA PARA PIHAK
1.	27 Februari 2016	Nota kesepahaman Antara Pemerintah kota Jambi dengan PT. Telekomunikasi Indonesia TBK Divisi Regional I Sumatera tentang kerjasama Pembangunan Smart City Kota Jambi	1 (satu) Tahun	1. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi 2. Epi Antonius General Manager PT. Telekomunikasi Indonesia TBK Wil. Telekomunikasi Jambi
2.	21 Maret 2016	Kesepakatan bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5 (lima) Tahun	1. Mr. Karliansyah Direktur Jendral Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Zumi Zola Gubernur Jambi 3. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi
3.	04 April 2016	Kerjasama dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pegawai tidak tetap pusat		1. Untung Suseno Sekjen Kemenkes 2. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi
4.	15 April 2016			1. OMBUDSMAN 2. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi
5.	26 Agustus 2016	Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Kota Jambi dengan Komandan Kodim 0415 Batanghari tentang Kegiatan Karya Bhakti Pembangunan/ Pemeliharaan Jaringan Sungai, Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Pekerjaan Normalisasi Sungai Tahun 2016	5 (Lima) Bulan	1. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi 2. Widodo Noerchayo Komandan Distrik Militer 0415 Batanghari
6.	29 Agustus 2016	Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk, Kantor Cabang Jambi tentang Pemanfaatan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2)	3 (tiga) Tahun	1. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi 2. Roganda SM Siahaan Kepala Bank BTN Jambi
7.	29 Agustus 2016	Pemanfaatan jasa dan Layanan untuk menerima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2)		1. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi 2. Andreas Kurniawan Marketing Strategy Division Head
8.	29 Agustus	Pemanfaatan layanan Bukopin untuk Penerima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2)		1. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi 2. Akhmad Yoni Wirawan Pemimpin PT. Bank

				Bukopin Tbk, Cabang Jambi
9.	29 Agustus 2016	Pemanfaatan Layanan Pos untuk Penerimaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	2 (dua) Tahun	1. H. Syarif Fasha, ME Walikota Jambi 2. Dimat Tjachrudi Kepala Regional III Sumbagselbabel
10.	3 September 2016	Pengadaan CPNS Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian		1. Hari Priyono Sekjen Kementerian Pertanian RI 2. H. Syarif Fasha, ME Walikota Jambi
11.	4 Oktober 2016	Kerjasama dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik berupa Penyuluhan Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sederajat	1 (satu) Tahun	1. Dwi Prasetyo Santoso, SH, MH Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi 2. H. Syarif Fasha, ME Walikota Jambi
12.	30 November 2016	Nota kesepahaman Antara Kepolisian Daerah Kota Jambi dengan Pemerintah Kota Jambi tentang Assesment Seleksi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi		1. Brigjen Pol. Drs. Yazid Fanani, Msi Kapolda Jambi 2. H. Syarif Fasha, ME Walikota Jambi
13.	15 Desember 2016	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Daya Mitra Telekomunikasi tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Smart City Kota Jambi	1 (satu) Tahun	3. H. Syarif Fasha, ME Walikota Jambi 4. Rakhmad T. Afifudin Direktur Bisnis PT. Daya Mitra Telekomunikasi

Selain kerjasama dengan Asosiasi di Indonesia, Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2016 seperti tahun 2015 tetap melakukan kerjasama dengan ICLEI dan UCLG.

ICLEI, atau *International Council for Local Environmental Initiatives* merupakan asosiasi pemerintah daerah, nasional dan regional yang memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Semenjak keanggotan Pemerintah Kota Jambi yang di mulai tahun 2015, Kota Jambi pada tahun 2016 menandatangani MOU program *Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN)* dan Compact of Mayor pada Kongres Kota Berketahanan Iklim se-Asia Pasifik 2016 di Melaka yang diselenggarakan bersamaan dengan the 16th *International Convention on Melaka Twn Cities* pada tanggal 2 – 4 Maret 2016. Pemerintah Kota Jambi juga diundang sebagai narasumber pada konferensi *Municipal Finance, Sustainable Urban China dan Smart Cities* pada bulan Mei, 2016 di Berlin yang merupakan bagian dari Metropolitan Solution, namun tidak dapat dihadiri karena kegiatan di kota. Pada akhir tahun 2016, pemerintah Kota Jambi melalui Badan Lingkungan Hidup berkerja sama dengan Dinas Pertanian, Perikanan

dan Perternakan Kota Jambi mengirim proposal Pertanian Perkotaan Organik sebagai salah satu bentuk bantuan (*grant*) dari MOU ACCCRN.

Pada bulan Mei 2016, pemerintah kota Jambi diundang menjadi narasumber pada acara *Sub-National Leaders Meeting on Sustainable Development, From Cities to the World* di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, yang dilaksanakan dengan peluncuran forum *Compact of Mayors* yang ditanda tangani oleh kurang lebih 15 kota di Indonesia. Pemerintah Kota Jambi sendiri telah menandatangani MOU *Compact of Mayors* pada bulan Februari 2016 di Melaka.

Selain itu ditahun 2016, Pemerintah Kota Jambi menjadi anggota aktif **UCLG** atau *United Cities dan Local Government* yang payung dari semua organisasi kota, pemerintah daerah, kabupaten di seluruh dunia, dengan tujuan untuk :

- 1) Mempromosikan demokrasi di pemerintahan daerah dengan mengutamakan persatuan dan kerjasama antara anggota,
- 2) Mempresentasikan pemerintah local di wahana internasional, PBB dan komunitas internasional lainnya,
- 3) Menjadi sumber dari semua informasi terkait dengan pembelajaran, pertukaran, peningkatan kapasitas daerah,
- 4) Mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan untuk meningkatkan layanan publik dengan prinsip *good governance*,
- 5) Mempromosikan kerjasama dalam hal desentralisasdi dan kerjasama internasional antara pemerintah daerah dan organisasi lainnya.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota telah difasilitasi mengikuti seminar dan training diantaranya:

1. Seminar *smart cities aspirations and challenges UCLG Aspac Executive Bereau Meeting* di New Delhi India pada tanggal 4 – 9 Mei 2016. Pemerintah Kota Jambi menjadi pembicara sesi *Innovative Urban Governance and Empowered City Leadership - A Requisite for Urban Transformation*. Pada saat bersamaan, pemerintah kota Jambi berkunjung ke Duta Besar RI untuk India, bapak Rizali Wilmar Indrakesuma yang didampingi oleh Sekretaris I Bidang Ekonomi KBRI a membicarakan rencana pertemuan produsen Indonesia dan buyer India di KBRI, yang kemudian *difollow up* dengan mengundang pemerintah Kota Jambi untuk menghadiri New Delhi expo pada bulan Agustus 2016.
2. Sebagai nara sumber pada Congress ULCG ASPAC yang ke-6 di Jeollabuk, Korea Selatan, "*Region, Life and Culture in the New Urban Agenda*". pada tanggal 5 – 9 September 2016. Pemerintah Kota Jambi memberikan paparan pada sesi *UN Habitat's Principles and Approaches for Sustainable Urban Development and Planning* yang di hosted oleh UN Habitat dan UCLG ASPAC.
3. Sebagai narasumber pada acara *UCLG ASPAC Coordination Meeting with Indonesian Cities and Local Governments* pada tanggal 27 Oktober 2016, di Solo, pada sesi "*Making*

Connectivity and Impact in the Ground: Pro-poor and Sustainable Solid Waste Management for Secondary City/Town, yang dipaparkan oleh Wakil Walikota Jambi, yang dihadiri oleh kepala daerah dari: Malang, Sragen, Tangerang Selatan, Bojonegoro, Solo, Salatiga, Jakarta dan beberapa perwakilan dari negara Asia Pacific seperti Makati, Phillipine, Korea Selatan, Korea Utara, India, Bangladesh, dan Maldives.

Kerjasama lain dengan pihak ketiga, juga dilaksanakan dalam bentuk keikutsertaan pemerintah kota Jambi dalam program dan kegiatan yang dibantu oleh pemerintah pusat KLHK dan bantuan luar negeri, diantaranya adalah Pilot Project *Waste To Energy* (WTE) yang merupakan grant dari UNESCAP dan difasilitasi oleh UCLG. Pada tahun 2016, lokasi WTE telah dipilih yaitu Pasar Talangbanjar. Dikarenakan MOU antara UNESCAP dengan KLHK berakhir pada akhir tahun 2016, sementara masih ada pekerjaan fisik yang selesai, maka MOU antara KLHK dan UNESCAP diperpanjang sampai akhir Desember 2017.

Keikutsertaan pemerintah kota Jambi dalam project WTE ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah kota Jambi untuk menghadiri training tentang *Solid Waste Management* di Thailand yang diikuti oleh ASN dari BLH dan pelatihan IRRC (*Integrated Resource Recovery Center*) di Bangladesh, yang diikuti oleh ASN dari BLH, DKPP dan Dinas Pasar.

Pemerintah Kota Jambi juga diundang menjadi pembicara pada *workshop on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in Asian and Pacific Cities*, di *United Nations Conference Centre*, Bangkok, Thailand, 28 November – 2 Desember 2016. Pemerintah Kota Jambi memberikan masukan tentang Urban SDGs Platforms yang telah disusun oleh ESCAP beserta team, yang juga dilakukan *soft launch Platform* tersebut. *Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan agenda internasional yang didukung oleh negara – negara berkembang maupun maju. SDGs dimulai semenjak tahun 2015 yang merupakan follow up dari beberapa target dalam MDGs.

6.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan / atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan di implementasikan melalui kegiatan koordinasi pemerintahan daerah dengan instansi vertikal di daerah yang diarahkan untuk mensinergikan dan

mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah sebagai proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah melalui rapat-rapat yang berbentuk forum, yaitu :

1. Forum Koordinasi Keamanan Ketentraman dan Ketertiban
2. Forum Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
4. Forum Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
5. Forum Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)
7. Forum Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitas bagi ORKEMAS dan PARPOL
8. Forum Pembinaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik.

6.4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Kota Jambi merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jambi, hal ini diresmikan dengan dikeluarkannya UU No. 61 tahun 1958 pada tanggal 6 Januari 1957. Dengan luas wilayah ± 205.38 km² (berdasarkan UU No. 6 tahun 1986), secara geografis terletak pada 01° 30' 2.98" - 01° 7' 1.07" lintang selatan dan 103° 40' 1.67" - 103° 40' 0.23" bujur timur. Dimana seluruh wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain Kabupaten Muaro Jambi dapat diartikan sebagai kawasan interland dimana Kota Jambi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Seiring perjalanan waktu, luas Kota Jambi mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 - 2033 kondisi *existing* luas Kota Jambi ± 17.553 ha. Akan tetapi saat ini masih terjadi perbedaan pandangan antara Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi terkait batas-batas wilayah pada beberapa titik koordinat. Hal ini masih terus dalam upaya mencari kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dimediasi oleh Pemerintah Pusat.

Disamping itu, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Pall Merah jumlah Kecamatan di Kota Jambi saat ini terbagi menjadi 11 Kecamatan. Dimana sebelumnya berjumlah 8 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Pasar, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.

6.5. PENANGANAN BENCANA

Kota Jambi adalah merupakan bagian dari Pulau Sumatera dan termasuk dalam lingkup Propinsi Jambi, dibagian barat Propinsi Jambi terdapat pegunungan Bukit Barisan yang dibatasi oleh Gunung Kerinci dan bagian timurnya langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan hilir dan selalu menerima kiriman air dari beberapa anak sungai di bagian hulunya sehingga rawan akan banjir, perubahan iklim juga sering berpengaruh langsung sebagai penyebab timbulnya bencana, oleh karena itu Kota Jambi dikategorikan masih termasuk dalam lingkaran ancaman bencana terutama yang disebabkan oleh alam, kerawanan Kota Jambi terhadap bencana dapat dilihat juga dari sering terjadinya bencana seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, bencana angin puting beliung dan bencana kabut asap.

Pada tahun 2016 tingkat kejadian kebakaran menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 181 kejadian menjadi 69 kejadian atau sekitar 61%. Selain tindakan penyelamatan, BPBD Damkar pada tahun 2016 juga memberikan bantuan korban bencana alam sebesar Rp. 576.000.000,- kepada 91 orang penerima bantuan sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 tahun 2015. Penurunan tingkat kejadian kebakaran disebabkan telah meningkatnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan bencana kebakaran serta hal-hal yang dapat dipengaruhi oleh musim kemarau.

Dari 69 kejadian, penyebab kebakaran yang paling tinggi masih dipengaruhi oleh Korsleting Listrik sebanyak 41 kejadian, dengan jumlah kejadian terbesar berada di Kecamatan Jelutung, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.3.
Kejadian Kebakaran Tahun 2016 Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian	Keterangan
1	Pasar	6 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
2	Jambi Timur	8 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
3	Telanaipura	10 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
4	Jambi Selatan	6 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
5	Kotabaru	6 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
6	Pelayangan	2 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
7	Danau Teluk	3 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
8	Jelutung	11 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
9	Alam Barajo	3 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
10	Danau Sipin	6 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
11	Paal Merah	9 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
12	Muaro Jambi	0 Kejadian	-
	Jumlah	69 Kejadian	

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi

Dalam kejadian kebakaran selama tahun 2016 menimbulkan korban jiwa sebanyak 1 (satu) orang, dan kerugian materi diperkirakan sebesar Rp. 9.211.400.000,- (Sembilan milyar dua ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Jambi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi dan masyarakat secara umum, di Kota Jambi telah dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang anggotanya terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan Kota Jambi serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang terkait dan berbagai unsur masyarakat

Dalam menghadapi bencana, Tim Penanggulangan Bencana Kota Jambi selalu berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana Propinsi, hal ini bermanfaat karena jika pada saat terjadi bencana Tim Penanggulangan Bencana Kota Jambi bisa mendapatkan bantuan dengan cepat utamanya untuk penanggulangan tanggap darurat

Adapun kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka persiapan penanggulangan bencana di Kota Jambi adalah :

1. Telah disiapkan satu regu Tim SAR dari Personil Kodim 0415 Batanghari Khusus untuk penanganan banjir Aliran Sungai Batanghari ini dan bila terjadi keadaan memaksa maka dapat diturunkan Tim dari Pol Airut.
2. Telah disiapkan Tim Siaga Satuan Penanggulangan Bencana yang posko utamanya berada di Dinas Kesbang & Polinmas Kota Jambi, anggotanya terdiri dari lintas sektoral Instansi dalam Kota Jambi termasuk dari TNI dan Polri.
3. Telah disiapkan Tim Pemantau Daerah Rawan Bencana khususnya Banjir untuk melihat situasi dan Kondisi dinamika ketinggian air terutama pada saat musim hujan.
4. Melaksanakan Tindakan Pemadaman kebakaran sesuai dengan data bencana kebakaran dengan menggunakan peralatan yang tersedia, dan juga memberikan bantuan peduli bencana bagi masyarakat yang terkena bencana khususnya kebakaran.

6.6. PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.6.1 *Gangguan Yang Terjadi*

Selama tahun 2016, secara umum kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kota Jambi cukup baik. Adapun masalah yang terjadi yaitu konflik rumah ibadat di 5 (lima) tempat. Setelah dilaksanakan musyawarah dan disepakati bersama, maka diputuskan untuk membuat Peraturan Walikota Jambi tentang masalah pendirian rumah ibadat. Pemerintah Daerah dan FKUB Kota Jambi akan memfasilitasi pengurusan izin rekomendasi pendirian rumah ibadat.

Selanjutnya mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih dalam skala kecil dan relatif terkendali seperti berupa pelaksanaan aksi-aksi demonstrasi/unjuk rasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertib, masih banyaknya pengemis dan pengamen jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat umum, Pelanggaran Perda dan Keputusan Walikota, kenakalan remaja dan anak sekolah, penggunaan lahan parkir yang tidak tertib.

6.6.2 SKPD Yang Terlibat Dalam Penanganan Ketertiban dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 148 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk membantu Kepala daerah dalam menegakkan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Sedangkan Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota Jambi dilaksanakan secara lintas sektoral artinya ditangani oleh beberapa SKPD, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Sosnaker) dan Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) serta berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Dalam pelaksanaan pengamanan keamanan dan ketertiban secara langsung dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosnaker, sedangkan untuk kegiatan yang berbentuk pemantauan dan koordinasi seperti pembentukan komisi intelejen daerah, forum komunikasi antar umat beragama, badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Kesbangpollinmas.

6.6.3 Penanggulangan dan Kendala

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Perda PKL No.5 Tahun 2006 dan PW No.6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan,

untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi. Adapun area yang telah dilakukan penataan PKL selama tahun 2016 antara lain:

- a. Pasar Angso Duo dan sekitarnya,
- b. Pasar Talang Banjar dan sekitarnya,
- c. Pasar Keluarga, Tugu Juang dan sekitarnya
- d. Pasar Simpang Pulai dan sekitarnya
- e. Pasar Kebon Andil dan sekitarnya
- f. Pasar Simpang Bata dan sekitarnya
- g. Pasar Mayang sari dan sekitarnya
- h. Daerah-daerah sepanjang Jalan Protokol seperti: UNJA dan sekitarnya; IAIN dan sekitarnya; Sukorejo dan sekitarnya; Bandara dan sekitarnya;
- i. Daerah sepanjang Jalan Pattimura (STM, Mayang dan Nusa Indah)
- j. Daerah sepanjang jalan Kuburan Cina dan sekitarnya
- k. Daerah Perbatasan dengan Muara Jambi dan Terminal Alam Bara
- l. Daerah Paal V dan Jenderal Basuki Rahmat
- m. Pasar Jelutung dan sekitarnya

Satuan polisi pamong praja juga mengadakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah yang sudah diberlakukan di Kota Jambi, seperti izin mendirikan bangunan, izin undang-undang gangguan dan lain sebagainya.

Perkembangan pembangunan di Kota Jambi juga menimbulkan permasalahan sosial yaitu perkembangan anak jalanan, pengemis dan pekerja seks komersial yang pertumbuhannya cukup tinggi. Berkaitan dengan pekerja seks komersial Pemerintah Kota Jambi telah melakukan penutupan lokalisasi Payo Sigadung dan Langit Biru serta penghapusan praktek prostitusi sesuai dengan PERDA Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dan terus melakukan razia, pengawasan, penyuluhan dan pembinaan dengan bekerja sama antar aparat keamanan (Poltabes), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) dan Unsur pemerintah lainnya.

6.6.4 Keikutsertaan Aparat Keamanan dan Penanggulangan

Selama tahun 2016 pelaksanaan razia dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pramong Praja di berbagai wilayah dalam Kota Jambi dilaksanakan dengan berkoordinasi dan melibatkan unsur-unsur lain dalam pemerintahan termasuk aparat keamanan (POLRI dan TNI-AD). Tim Penertiban Pelanggaran Perda terdiri dari berbagai unsur Pemerintah termasuk aparat keamanan.